

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia suatu bangsa. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Siswoyo (2013), lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Ibrahim (2012) menyatakan, sekolah dasar adalah bagian dari pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Sekolah dasar merupakan

satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa, tanpa menyelesaikan pendidikan pada sekolah dasar atau yang sederajat, secara formal seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk itu pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta menyiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

Menurut Fitri (2014), Pengembangan sekolah secara menyeluruh akan menjadi dasar perencanaan dan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah tertentu, baik pengembangan jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan jangka panjang adalah pengembangan sekolah dalam lima tahun ke depan sedangkan pengembangan jangka pendek adalah pengembangan sekolah dalam satu tahun ke depan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan ,serta

menjaminakan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Salah satu peran Negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional sekolah (BOS). Keberhasilan pelaksanaan BOS dapat dilihat dari percepatan penuntasan wajib belajar.

Menurut Mulyasa E (2006), salah satu indikator percepatan penuntasan wajib belajar dapat diukur dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan proporsi jumlah anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada usia tertentu.

penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK minimum 95 % . Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Ray dan Pany (2001) dalam Mawanda (2008) menyebutkan kegiatan pengendalian sebagai komponen lain dari pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan . Kegiatan pengendalian dalam sebuah organisasi pada dasarnya terdiri dari ; penilaian kinerja (membandingkan kinerja aktual dengan anggaran , prakiraan dan kinerja periode sebelumnya) , pengolahan informasi (yang diperlukan untuk memeriksa akurasi, kelengkapan dan otorisasi transaksi) , kontrol fisik (yang diperlukan untuk memberikan keamanan di kedua catatan dan lain aset) , dan pemisahan tugas (di mana tidak ada satu orang harus menangani semua aspek transaksi dari awal sampai akhir) .

Dalam survei awal penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa aturan yang belum dilakukan oleh pihak sekolah yaitu ruang baca untuk murid ,perlengkapan belajar mengajar seperti buku membaca untuk siswa dan memberikan beasiswa bagi murid . Namun dalam kondisi nyata banyak terkendala yang disebabkan karena banyaknya aturan penggunaan dan larangan penggunaan dana BOS membuat pihak sekolah sulit membelanjakan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan dasar, termasuk ketentuan- ketentuan pembelian buku ,tempat perpustakaan yang telah ditentukan di dalam juknis BOS Dengan memperhatikan penjelasan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk

meneliti sejauh mana pelaksanaan pengendalian internal di sekolah SD AL-Khairaat Tobelo Halmahera Utara.

Pengendalian internal atas pelaksanaan dana bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah dasar SD AL – Khairaat Tobelo Halmahera Utara sangat penting dikaitkan dengan peningkatan kualitas sekolah terutama dalam bidang kegiatan proses belajar mengajar ,manajemen sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah ,sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan.Selain itu pula pelaksanaan pengendalian internal biasa berjalan sesuai dengan Juknis Nomor 76 Tahun 2012, dan dana BOS Secara transparansi Kepada masyarakat dan pemerintah.

Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian intern secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka sekolah atau perusahaan nirlaba tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko. Menurut Wilkison (1996) seperti yang telah dikutip oleh Akbar (2012:22) mengungkapkan bahwa :”jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi lebih kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Di sisi lain, tanpa pengendalian internal, kondisi yang membawa dampak negative bagi sekolah atau perusahaan nirlaba mungkin akan terjadi, seperti kesalahan pengambilan keputusan, inefisiensi biaya, kehilangan aset, terhentinya kegiatan usaha maupun karena sanksi

Sekolah Dasar AI – Khairaat Tobelo memiliki sebuah sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan dana BOS yang ditunjukkan dari prosedur-prosedur dan adanya sistem otorisasi dari bendahara sekolah kepada kepala sekolah. Selain itu adanya pengawasan terhadap penggunaan dana BOS sesuai dengan pembiayaan yang tertuang di dalam Juknis BOS. Pada saat ini penyaluran dana

BOS dari pusat tidak tepat waktu sehingga untuk sementara waktu semua pembelanjaan SDN Bulurejo diambilkan dari dana sukarela yang didapat dari

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem pengendalian internal atas pelaksanaan dana BOS pada SD AL-KHAIRAAT Tobelo Halmahera utara sesuai dengan Juknis Nomor 76 Tahun 2012 dapat di rumuskan judul penelitian dengan judul." Analisis Pengendalian Internal atas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD AL- KHAIRAAT Tobelo Halmahera Utara"

1.2.Rumusan Masalah

Dengan disampaikan uraian diatas ,maka yang menjadi rumusan masalah dalam peneltian ini adalah :

- 1.Bagaimana sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar AI – Khairaat Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ,Kecamatan Tobelo tahun 2019 - 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar SD AI – Khairaat Tobelo ,Kabupaten Halmahera Utara ,Kecamatan Tobelo tahun 2019 – 2020.
- 2.Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar AI – Khairaat Tobelo ,Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Tonelo tahun 2019 – 2020 sudah berjalan dengan baik.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat praktis

- 1.Bagi Sekolah

Membantu pihak sekolah dalam menjalankan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan pengendalian internal pengelolaan dana BOS dan di harapkan bias membantu pihak sekolah membuat informasi akuntansi yang akurat sesuai dengan peraturan dari kemendagri juknis 76 tahun 2012.

2. Bagi Akademik

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan dan juga dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan .

1.4.2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan analisis pengendalian internal terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.

Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah